

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fuady, M. (2018). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti, Sinar Grafika, Bandung
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan (Buku Kesatu)*. PT Rajagrafindo. Jakarta
- Harahap, M. Yahya. (2023). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan 23. Sinar Grafika, Jakarta
- Hendri Jayadi,(2021). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Irwansyah, (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Nazaruddin, A., Putri, Y. H., & Siregar, L. D.(2021). *Manajemen koperasi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*. Sumatera Selatan
- Nur Solikin,(2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Peter Mahmud Marzuki, (2019). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Shubhan, M. H. (2019). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan (Cet. ke-6)*. Kencana Prenada Media Group.
- Simanjutak, Ricardo. (2023) *.Undang-undang Kepailitan dan PKPU Indonesia*. Gramedia. Jakarta

Sjahdeini, S. R. (2018) . *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Yulianto. (2023). *Pengantar Hukum Kepailitan: Teori dan Praktek*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Yitawati, Krista, Pujiyono, dan Adi Sulistyono. (2022) *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Deepublish. Yogyakarta

Yuvanda, S., & Rachmad, H. M. (2021). *Ekonomi koperasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jambi.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*. *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1874

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3598).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang oleh Koperasi yang Memerlukan Persetujuan Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

C. JURNAL

Annisa Rahma Rafidah, Azzahra Nurrachman. (2024). *Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. 4(2). 398-407

Asshidiq, A. W., Yustisio, R., & Reza, M. H. M. (2023). *Kekuatan hukum badan hukum yang berbentuk koperasi dalam mengajukan permohonan kepailitan*. *Realism: Law Review*, 1(2), 45–70. DOI: <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.18>

Avisena, A. F., & Liestiara, D. R. (2023). *Reformasi hukum kepailitan terhadap koperasi: Pembatasan permohonan pailit terhadap koperasi oleh anggota*. *Jurnal Legislatif*, 6(1).1-14, DOI: <https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885>

Rahayu, D., Sabar, Rohayati, I., Nurjannati Iskandar, F., & Heriansyah, D. (2025). *Peningkatan Kapasitas Akuntansi Koperasi melalui Sosialisasi SAK-EP di Desa Sayati*. *Room of Civil Society Development*, 4(4), 681–693. DOI: <https://doi.org/10.59110/rcsd.708>

Fernando Situmorang, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed, (2023), *Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 117-127.

Hendra Catur Putra, (2023). *Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Elqonun*, 1(2), 133-143, DOI: <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i2.21727>

Ikhsan Lubis. (2025) *‘Sosialisasi dan Pendampingan Hukum dalam Pendirian Badan Hukum Koperasi’*. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pemerintahan*. Fakultas Hukum Universitas Prima. 5(1), 1-14, DOI: <https://doi.org/10.30743/jurpammas.v5i1.12024>

- Imam Buchari (2025). *Tinjauan Perkembangan Hukum Perkoperasian di Indonesia. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*. 1(2). 123–141. DOI: <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.10>.
- Ismail, Y., & Harsono, (2021). *Tinjauan Yuridis Pasal 25 Ayat (1) Huruf d Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1).49-70, DOI: <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v3i1.32>
- Putra, Hendra Catur. (2023). *Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*. 1(2),130–143. DOI: <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i2.21727>
- Reza Boentoro, & Edrick Edwardina Effendy, (2025). *Implementasi Kompensasi (Perjumpaan Utang) sebagai Bentuk Penyelesaian Utang di Era Modern. Notary Journal*, 5(2), 146-157. DOI: <https://doi.org/10.19166/nj.v5i2.10176>
- Kendati, C., Yuhelson, Y., & Maryano, M. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anggota terkait koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1),20-31, DOI: <https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1121>
- Novi Antry dan Kusroh Lailiyah, (2026). *Perlindungan Hukum Debitur Korporasi Solven dalam Perkara Kepailitan, QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3), 116-135. DOI: <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.5689>
- Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. (2023). *Prosedur hukum permohonan pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2). 441-455, DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2>
- Situmorang, F., Lina Sinaulan, R., & Ismed, M. (2023). *Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 117–127.

- Shelomita Putri Amelia & Ema Nurrkhaerani. (2024). *Penundaan Keadaan Insolvensi Terhadap Proses Kepailitan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3). 112-123. DOI: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.683>
- Sianturi, I. S. B. ., & Kartika, A. W. (2024). *Analisis Civiliter Mortuus Pengurus Koperasi Sebagai Akibat Hukum Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(12), 14124-14133. DOI : <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6610>
- Susanto, Nur Agus. (2019). *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST terhadap Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Crepido. 1(1). 13–24. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-24>
- Yoas Panggawa Silitonga, Elisatris Gultom, Anita Afriana, (2024,) *Pengaturan Batasan Utang Dalam Permohonan Pailit Analisis Undang-Undang PKPU dan Kedudukan Putusan Hakim*, Pakuan Law Review, 10 (4), 28-36. DOI: <https://doi.org/10.33751/palar.v10i4>
- Yustinus Cahya Donatha, Dewa Ayu Dian Sawitri. (2025). *Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3(1). 1-7. DOI: <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>
- Zakaria, B. (2022). *Pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, dan pengalaman kepengurusan koperasi terhadap sistem pengendalian intern (Studi kasus pada koperasi yang ada di Kota Ternate)*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK), 3(2), 1–15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6955764>

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

E. LAIN-LAIN

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023. *Kajian Hukum Kepailitan di Indonesia*. <https://bphn.go.id> Diakses 23 Januari 2026

Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2024. *Perkembangan Data Koperasi di Indonesia*. <https://kemenkopukm.go.id> . Diakses 21 Desember 2025

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> Diakses 5 November 2025

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Perlindungan Konsumen dan Risiko Lembaga Keuangan*. <https://ojk.go.id> . Diakses 23 Januari 2026